



► PENDAPATAN DAERAH

# Penerimaan Pajak Restoran & Hiburan Lampau Target

**WATES**—Penerimaan pajak restoran dan hiburan di Kulonprogo melampaui target. Untuk pajak restoran, dari ditarget Rp14,3 miliar, realisasinya mencapai Rp15,5 miliar. Untuk pajak hiburan naik tiga kali lipat, dari target di 2024 sebesar Rp19 juta, realisasinya mencapai Rp60 juta.

Triyo Handoko  
triyo@harianjogja.com

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menyebut kenaikan perolehan pajak ini disebabkan penambahan wajib pajak yang terus dilakukan.

Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak BKAD Kulonprogo, Chris Agung, menjelaskan selama 2024 terdapat 27 wajib pajak baru di sektor restoran. Penambahan ini terutama terjadi di wilayah utara Bumi Binangun yang mulai banyak berdiri restoran di kawasan wisata.

Kini, total wajib pajak restoran di Kulonprogo sekitar 200 unit. Jumlah ini meningkat dibanding

► Selama 2024 terdapat 27 wajib pajak baru di sektor restoran.

► Kunci lain penerimaan pajak restoran dan hiburan yang melampaui target yakni pengawasan yang efektif.

pada 2023 yang jumlahnya sekitar 180 rumah makan.

“Penambahan wajib pajak ini signifikan menambah penerimaan pajak, sehingga kami dapat mencapai bahkan melampaui target sebesar Rp1,5 miliar,” kata Chris saat ditemui, Kamis (2/1).

Chris menyebut, penambahan wajib pajak juga dilakukan di sektor hiburan. Sebelumnya, pelaku usaha hiburan yang dikenai pajak bersifat insidental, terutama penyelenggara *event*. Untuk saat ini terdapat tempat usaha hiburan tetap yang dikenai pajak.

Total ada lima wajib pajak baru dari sektor hiburan ini, antara lain Kolam Renang UNY Wates, dan sejumlah tempat lain seperti usaha gim dan kebugaran hingga biliar. “Kami terus mengkaji potensi yang ada, sekaligus terus menambah wajib pajak di 2025 ini,” katanya.

Kunci lain penerimaan pajak

restoran dan hiburan yang melampaui target, menurut Chris, adalah pengawasan yang efektif. “Dua sektor ini pelaporan pajaknya *self assessment* dari wajib pajak sendiri, sehingga kunci lainnya yakni pengawasan yang efektif dan tepat sesuai realita sehingga meminimalkan kecurangan,” katanya.

Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah BKAD Kulonprogo, Budi, menyebut pengawasan yang dilakukannya terhadap wajib pajak restoran juga dilengkapi *tap box*. Alat ini memantau secara langsung jumlah konsumen yang berkunjung ke tiap restoran.

Melalui alat ini, maka bisa dilakukan pencocokan data pelaporan wajib pajak dengan hasil perhitungan *tap box*. “Sekarang ada 60 *tap box*, dan pada 2025 kami berencana menambah *tap box* agar pengawasan lebih maksimal,” katanya.

BKAD, menurut Budi, juga melakukan pendekatan yang efektif kepada wajib pajak restoran dan hiburan agar menaati pembayaran. “Kami melakukan pendekatan secara humanis, kami mengedukasi juga bahwa pajak ini dibayarkan pelanggan, jadi tidak mengurangi keuntungan wajib pajak,” katanya.